

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH SUMBER DAYA
MANUSIA DAN PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI
TERHADAP KETERANDALAN PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu)

Oleh :

Putri Larassati

Pembimbing : Andreas dan Supriono

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : putrilarassati1311@gmail.com

*The influence Of Information Technology Utilization, Control Of Financial
Statements, Human Resources, And Internal Control Accounting
Of The Local Government Financial Reporting Reliability
(Study on the Government of Indragiri Hulu)*

ABSTRACT

The purpose of this research to examined the influence of information technology utilization, control of financial statements, human resources, and internal control accounting on the local government financial reporting reliability at SKPD of Indragiri Hulu. The population in this study were employed who worked in the SKPD of Indragiri Hulu. This research used 75 sample of questionnaires response from employed who workes in the SKPD of Indragiri Hulu by using purposive sampling method. Analysis model used in this study is the multiple linear regression analysis with SPSS Version 20.00. The result of this study is showed that information technology utilization, local financial monitoring, human resources, and internal control accounting have significant influence on the local government financial reporting reliability. Simultaneous regression test (F-test) showed that all dependent variable have significant influence to the dependent variable. The coefficient determination (R^2) effect by all independent variable are 85,9% while the remaining 14,1% influence by other variables were not examined in this study.

Keyword : Information Technology Utilization, Control Of Financial Statements, Human Resources, Internal Accounting Control, Local Government Financial Reporting

PENDAHULUAN

Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas

pengelolaan keuangan kepada publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas

publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan. Fungsi informasi dalam laporan keuangan tidak akan memiliki manfaat jika penyajian dan penyampaian informasi keuangan tersebut tidak andal dan tidak tepat waktu.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KKAP, Lampiran I: par. 35-40) menjelaskan bahwa agar laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya diperlukan karakteristik kualitas laporan keuangan, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Keterandalan pelaporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran I: par. 38) merupakan kemampuan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, informasi dalam laporan keuangan tersebut menyajikan fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.

Fenomena pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengingat semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Dalam laporan keuangan pemerintah faktanya, masih terdapat adanya ketidaksesuaian data-data dan penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam

pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah.

Hal ini dapat kita lihat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014.

Selain itu, BPK RI menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu (1) Penyertaan modal di 3 (tiga) BUMD tidak berdasarkan Perda dan nilai investasi permanen pada PDAM Tirta Indra tidak dapat diyakini kewajarannya; (2) Penyertaan modal kepada PD Indragiri berupa aset tidak dapat diyakini kewajarannya, pengembalian 13 (tiga belas) aset kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu belum berdasarkan BAST dan biaya operasional PD Indragiri membebani APBD TA 2014; (3) Pengelolaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu TA 2014 belum optimal, dan (4) dan Pengelolaan aset lain-lain belum optimal.

Permasalahan lain terkait adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu; (1) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, pertimbangan objektif lainnya, prestasi kerja tidak berdasarkan kriteria yang terukur; (2) Pertanggungjawaban biaya tiket pesawat tidak sesuai dengan harga sebenarnya, biaya perjalanan dinas melebihi tarif, indikasi perjalanan dinas tidak dilaksanakan, serta realisasi perjalanan dinas belum

dipertanggungjawabkan; (3) Terdapat kelebihan pembayaran pada 4 (empat) paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Jaminan Pemeliharaan belum dicairkan; dan (4) Terdapat kelebihan pembayaran pada paket pekerjaan pembangunan SDN 007 Sekip Hulu (tahap I) dan tanggung jawab pemeliharaan yang belum dilaksanakan.

Banyak faktor yang mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah di Kabupaten Indragiri Hulu, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah pemanfaatan teknologi informasi. Secara umum manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan membantu dalam penyiapan laporan.

Selanjutnya faktor kedua yang mungkin mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pengawasan keuangan daerah. Untuk menyajikan informasi keuangan yang andal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007).

Faktor selanjutnya yang mungkin mempengaruhi yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai.

Hal terakhir yang mungkin memiliki pengaruh adalah pengendalian intern akuntansi. Sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan subjek

terjadinya kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi (Mahmudi, 2007).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin menguji kembali Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu? 2) Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu? 3) Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu? 4) Apakah pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu?

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Keterandalan Pelaporan Keuangan

Keterandalan pelaporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran I: par. 38) merupakan kemampuan informasi dalam laporan

keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, informasi dalam laporan keuangan tersebut menyajikan fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut bisa saja tidak akan mempercayai informasi yang disajikan tersebut.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Undang-undang RI Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, mengatakan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja.

Pemanfaatan teknologi informasi berarti memanfaatkan teknologi dalam pengolahan data untuk mempermudah kerja pegawai.

Pengawasan Keuangan Daerah

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010, pengawasan keuangan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan

atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Pengawasan juga berfungsi untuk memastikan apakah yang telah direncanakan dan diorganisasikan berjalan sebagaimana mestinya atau tidak

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Urban, 2001).

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

Pengendalian Intern Akuntansi

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, pengendalian intern akuntansi adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara,

dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemanfaatan teknologi informasi berarti memanfaatkan teknologi dalam pengolahan data untuk mempermudah kerja pegawai. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Hamzah, 2009).

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Dengan adanya teknologi informasi ini dapat membantu pegawai-pegawai pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah serta memudahkan dalam memproses, mengolah, dan menyimpan data keuangan secara sistematis.

Hal ini dibuktikan oleh penelitian Kadek (2014) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

H₁ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan merupakan upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, diharapkan akan dapat segera dideteksi atau diambil tindakan koreksi, sehingga informasi keuangan dapat segera digunakan oleh pemakai, dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal.

Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan Armando (2013) menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

H₂: Pengawasan keuangan berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam proses

penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan hasil laporan yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Winidyaningrum & Rahmawati, 2010).

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah aparat-aparat pemerintah yang memiliki posisi sangat penting dalam suatu organisasi pemerintahan daerah. Maka dari itu, dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas agar laporan keuangan yang disusun baik dan andal. Sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah haruslah berkompeten dan independen serta mampu bertanggung jawab atas laporan yang telah disusunya

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum (2010) membuktikan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

H₃: Sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, pengendalian intern akuntansi adalah proses yang integral

pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan pondasi *good governance* dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan LKPD.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kadek (2014) membuktikan bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

H₄: Pengawasan intern akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu yang berjumlah 27 SKPD. Pensampelan atas responden dilakukan secara *puprosive*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2006).

Sampel dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/keuangan pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu yang berjumlah 27 SKPD. Dari setiap SKPD akan diambil 3 responden dengan kriteria Kasubag keuangan, bendahara dan staff keuangan. Sehingga sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 81 responden.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan melalui survei kuesioner. Skala pengukuran responden yang digunakan adalah 5 (lima) point dengan skala likert.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Keterandalan Pelaporan Keuangan (Y)

Keterandalan pelaporan keuangan merupakan kemampuan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, informasi dalam laporan keuangan tersebut menyajikan fakta secara jujur serta dapat diverifikasi (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). Konstruk nilai informasi keterandalan dapat diukur dengan indikator : (a) Kewajaran, (b) Kelengkapan Unsur Laporan Keuangan, dan (3) Generalisasi.

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1)

Undang-undang RI Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, mengatakan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan,

menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja. Beberapa indikator pada pemanfaatan teknologi informasi dapat dilihat dengan adanya : (1) Perangkat, (2) Pengolahan data keuangan, dan (3) Perawatan.

Pengawasan Keuangan Daerah (X2)

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010). Indikator dalam variabel ini adalah (1) Pelaksanaan dan penatausahaan, (2) Pertanggungjawaban keuangan daerah, dan (3) Pendapatan dan belanja daerah (Permendagri No. 23 Tahun 2007).

Sumber Daya Manusia (X3)

Sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Urban, 2001). Beberapa indikator pada sumber daya manusia dapat diukur dengan : (1) Kapasitas staf, (2) Tugas Pokok dan Fungsi, dan (3) Pengembangan.

Pengendalian Intern Akuntansi (X4)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pengendalian internal akuntansi adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2013:19).

Tabel 1
Statistik Deskriptif

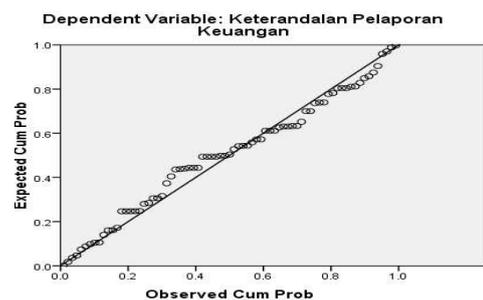
Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemanfaatan Teknologi Informasi	75	19	40	29.91	4.734
Pengawasan keuangan Daerah	75	24	50	38.20	5.560
Sumber Daya Manusia	75	24	50	38.37	5.895
Pengendalian intern Akuntansi	75	31	70	54.07	9.051
Keterandalan Pelaporan Keuangan	75	19	35	26.77	3.954
Valid N (listwise)	75				

sumber: Data Olahan, 2016

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Hasil normalitas dapat dilihat dari gambar 1 berikut ini:

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data Olahan, 2016.

Dari gambar diatas terlihat data tersebar disekitar garis diagonal. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa persyaratan normalitas data dapat terpenuhi.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.

Jika nilai $VIF > 10$ atau nilai $Tolerance < 0,10$ maka terdapat multikolinieritas.

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.417	2.401

Pengawasan Keuangan Daerah	.269	3.712
Sumber Daya Manusia	.443	2.258
Pengendalian Intern Akuntansi	.328	3.053

a. Dependent Variable: Keterandalan Pelaporan Keuangan

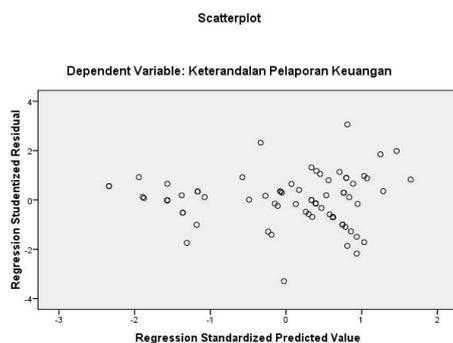
Sumber: Data Olahan, 2016

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa setiap variabel independen nilai VIF berada diantara 1.0-10, dan nilai tolerance 0.1-1.0. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel independen bebas dari pengaruh multikolinieritas

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Olahan, 2016.

Dari gambar *scatterplot* diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model

regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2013). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi digunakan Uji *Durbin-Watson* (DW test). Autokorelasi dideteksi dengan nilai *Durbin-Watson*. Batas tidak terjadinya autokorelasi adalah apabila angka yang ditunjukkan dari nilai *Durbin-Watson* berada antara -2 sampai dengan +2, maka dapat dikatakan model regresi tidak terdapat autokorelasi.

Tabel 3
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.927 ^a	.859	.851	1.526	1.877

a. Predictors: (Constant), Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Keterandalan Pelaporan Keuangan

Sumber: Data Olahan, 2016

Dari tabel 3 diatas, diketahui bahwa nilai *Durbin Watson* menunjukkan sebesar 1.877. Dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari autokorelasi yang mana nilai tersebut berada diantara -2 sampai dengan +2.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen (pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah, sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi) terhadap variabel dependen (keterandalan pelaporan keuangan).

Tabel 4
Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	.074	1.339		.056	.956
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.173	.058	.208	2.986	.004
Pengawasan Keuangan Daerah	.138	.061	.194	2.246	.028
Sumber Daya Manusia	.167	.045	.250	3.704	.000
Pengendalian Intern Akuntansi	.182	.034	.415	5.301	.000

a. Dependent Variable: Keterandalan Pelaporan Keuangan

Sumber: *Data Olahan, 2016*

Dari tabel diatas dapat diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 0,074 + 0,173X_1 + 0,138X_2 + 0,167X_3 + 0,182X_4 + e$$

1. Nilai konstanta (a) sebesar 0,074. Artinya adalah apabila variabel independen diasumsikan nol (0), maka keterandalan pelaporan keuangan sebesar 0,074.
2. Nilai koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi

sebesar 0,173. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan pemanfaatan teknologi informasi sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan sebesar 0,173 dengan asumsi variabel lain tetap.

3. Nilai koefisien regresi pengawasan keuangan daerah sebesar 0,138. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan pengawasan keuangan daerah sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan sebesar 0,138 dengan asumsi variabel lain tetap.
4. Nilai koefisien regresi sumber daya manusia sebesar 0,167. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan sumber daya manusia sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan sebesar 0,167 dengan asumsi variabel lain tetap.
5. Nilai koefisien regresi pengendalian intern akuntansi sebesar 0,182. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan pengendalian intern akuntansi sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan sebesar 0,182 dengan asumsi variabel lain tetap.
6. Standar error (e)

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan

pemerintah daerah diperoleh dengan nilai $t_{hitung} 2,986 > t_{tabel} 1,994$ dan $Sig 0,004 < 0,05$. Dengan demikian H_1 diterima dan H_0 ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini terbukti, karena semakin sering pemanfaatan teknologi informasi di manfaatkan oleh Dinas/badan/kantor di Kabupaten Indragiri Hulu maka akan meningkatkan kualitas keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah tersebut.

Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi pemerintahan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka semakin baik pemanfaatan teknologi informasi akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini didukung dari penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah diperoleh dengan

nilai $t_{hitung} 2,246 > t_{tabel} 1,994$ dengan taraf signifikan $0,028 (<0,05)$. Dengan demikian H_2 diterima dan H_0 ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan, bahwa semakin baik, atau efektif dan efisien pengawasan keuangan daerah dilakukan maka semakin meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pengawasan keuangan daerah dapat membantu pemerintah dalam mengontrol kegiatan-kegiatan SKPD dalam menggunakan anggaran dan menyusun laporan keuangan. Pengawasan keuangan ini sangat penting apalagi dalam lingkup pemerintahan, agar tidak terjadi hal-hal atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum pemerintahan itu sendiri. Apabila fungsi dari pengawasan ini dijalankan dengan baik oleh pemerintah maka sedikit sekali terjadi kemungkinan akan adanya kecurangan serta kesalahan-kesalahan.

Hasil yang diperoleh dalam pengujian hipotesis ini tidak mendukung dengan hasil penelitian Arfianti (2011) yang menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Namun, penelitian ini mendukung dari penelitian Kadek Hengki (2014) yang menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Berdasarkan hasil pada tabel 4 dapat dilihat pengaruh sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diperoleh dengan nilai $t_{hitung} 3,704 > t_{tabel} 1,994$ dengan taraf signifikan $0,000 (<0,05)$. Dengan demikian H_3 diterima dan H_0 ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini terbukti, karena semakin baik tingkat sumber daya manusia yang berkualitas pada subbagian keuangan di dinas/badan/kantor di Kabupaten Indragiri Hulu maka akan meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah tersebut.

Sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. Menurut Umar (2007) dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wiwik (2010) yang menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Pengujian Hipotesis Keempat

Berdasarkan pada tabel 4 dapat dilihat pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diperoleh dengan nilai $t_{hitung} 5,301 > t_{tabel} 1,994$ dengan taraf signifikan $0,000 (<0,05)$. Dengan demikian H_4 diterima dan H_0 ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini terbukti, bahwa semakin diterapkannya pengendalian intern akuntansi di dinas/badan/kantor pada Kabupaten Indragiri Hulu maka akan meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah tersebut.

Menurut Mahmudi (2007) sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode-metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholder*. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan pondasi *good governance* dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan LKPD.

Hasil yang diperoleh dalam pengujian hipotesis ini didukung oleh Indriasari (2008) dan

Winidyaningrum & Rahmawati (2010) yang menyatakan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 5
Hasil Uji Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.927 ^a	.859	.851	1.526	1.877

a. Predictors: (Constant), Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Keterandalan Pelaporan Keuangan

Sumber : *Data Olahan, 2016.*

Dari tabel diatas diperoleh nilai R Square (R^2) sebesar 0,859. Angka ini memberikan pengertian bahwa pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah, sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi memberikan pengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah sebesar 85,9% sedangkan 14,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Semakin sering pemanfaatan teknologi informasi dimanfaatkan untuk membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, hal itu akan meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

2) Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. Apabila pengawasan keuangan daerah semakin baik atau efektif dan efisien dalam menjamin semua pencatatan akuntansi dan keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku, maka akan tercapai tujuan keterandalan suatu laporan keuangan.

3) Sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. Sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan maka akan membantu menyelesaikan tugas dan menghasilkan pelaporan keuangan yang andal.

4) Pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan

meningkatkan kepercayaan *stakeholders*.

5) Nilai R^2 sebesar 0,859 berarti bahwa keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah, sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi sebesar 85,9%. Sedangkan sisanya sebesar 14,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Saran

1. Indragiri Hulu lebih memaksimalkan penggunaan/pemanfaatan teknologi informasi pada setiap SKPD dalam menggunakan dan menyusun laporan keuangan agar informasi yang tersedia lebih dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*).
2. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu harus meningkatkan pemahaman tentang pengawasan keuangan daerah dalam menyusun pelaporan keuangan agar tidak ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, sehingga akan meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada setiap SKPD.
3. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu lebih meningkatkan adanya pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai di setiap SKPD guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan tingkat keterandalan pelaporan keuangannya.
4. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sebaiknya lebih optimal menerapkan pengendalian intern

akuntansi di setiap SKPD guna memberikan keyakinan atas kualitas laporan keuangan dan mengurangi adanya ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan, sehingga akan menjamin keterandalan pelaporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Wiwik. 2010. Pengaruh Kapasitas SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan). *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, Vol 5 No.1 Juni 2010 ISSN 1858-3687 hal 69-80.
- Arfianti, Dita. 2011. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah". *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Armando, Gerry. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Bukittinggi). *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2014. *Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Semester*

- I Tahun 2014.
(<http://www.bpk.go.id/>).
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*.
- Indriasari, Desi & Ertambang Nahartyo. 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. SNA XI. Pontianak.
- Mahmudi, 2007. "Analisis Laporan Keuangan Daerah: Panduan Bagi Eksekutif DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi Sosial dan Politik". *Jurnal Akuntansi*. Vol. 1 No.3 April 2007. UPP STIM YKPN.
- Primayana Kadek Hengki, Anantawikrama. 2014. "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei di wilayah keresidenan Surakarta)". *Jurnal Akuntansi*. Vol. 02 No. 01.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Pemerintah.
- Sekaran, Uma. 2003. *Research Methods For Business: A Skill-Building Approach*. John Wiley and Sons Inc, New York.
- Tuasikal, A. 2007. "Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Vol. 08 No. 01. Februari 2007.
- Winidyaningrum dan Rahmawati. 2010. *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Interviening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN)*. *Jurnal SNA XIII*. Purwokerto.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.